



# RENCANA STRATEGIS

**INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2025 – 2029**



📞 (024)-3517283; (024)-3514351  
🌐 [inspektorat.jatengprov.go.id](http://inspektorat.jatengprov.go.id)  
📍 Jalan Pemuda 127 – 133  
Semarang 50132

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH .....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat .....	5
2.1.1 Tugas dan Fungsi .....	5
2.1.2 Struktur Organisasi .....	5
2.1.3 Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural .....	6
2.2 Sumber Daya Inspektorat .....	10
2.2.1 Susunan Kepegawaian .....	10
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	12
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Inspektorat .....	12
2.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat.....	24
2.5 Isu Strategis Inspektorat .....	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	32
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	36
3.3 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN .....	42
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	42
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah .....	42
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah .....	78
BAB V PENUTUP .....	80
LAMPIRAN .....	81

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Urip Sihabudin, S.H, M.H  
NIP : 196612241991031005  
Jabatan : Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Gubernur Jawa Tengah No. 800.1.3.3/0493 Tanggal 7 Agustus 2025. Bertugas untuk dan atas nama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 127-133, Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2025



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

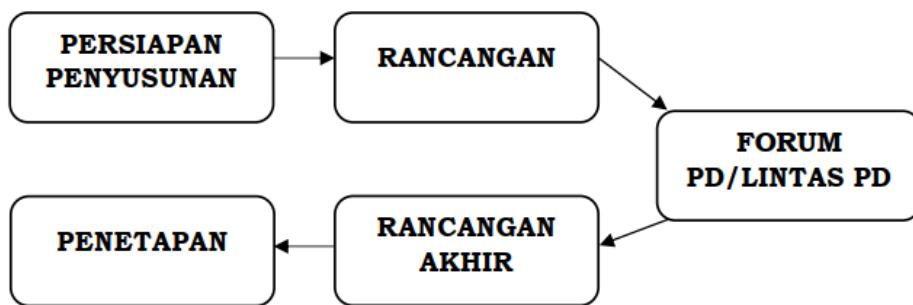
Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good government*), transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diperlukan sistem pengawasan intern yang efektif dan berintegritas. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah, serta menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Secara substansi, penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, serta mengacu pada kebijakan nasional RPJMN 2025–2029. Penyesuaian terhadap dinamika global dan nasional, termasuk digitalisasi pengawasan, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kapabilitas APIP, menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pengawasan lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra ini juga telah mempertimbangkan keterkaitan arah kebijakan dan isu strategis dari dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan latar belakang tersebut, serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih dalam proses penetapan.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan: (1) **persiapan penyusunan**; (2) **penyusunan rancangan**; (3) **pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**; (4) **perumusan rancangan akhir**; dan (5) **penetapan** sesuai pada gambar 1.1 di bawah ini:



**Gambar 1.1**

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan daerah, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  10. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
  12. Peraturan DPN Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
  13. Peraturan Asosiasi Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## 2. Tujuan

Menjadi pedoman Inspektorat dalam:

- a. Menyusun rencana kerja Inspektorat yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. Menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 2025-2029;
- c. Menjabarkan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Pendahuluan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 2.2 Sumberdaya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 2.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 2.5 Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 3.3 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

### BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan penguatan terhadap peran Inspektorat Daerah Provinsi selain melaksanakan peran pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya tetapi juga berperan untuk pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan amanat di atas, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
9. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

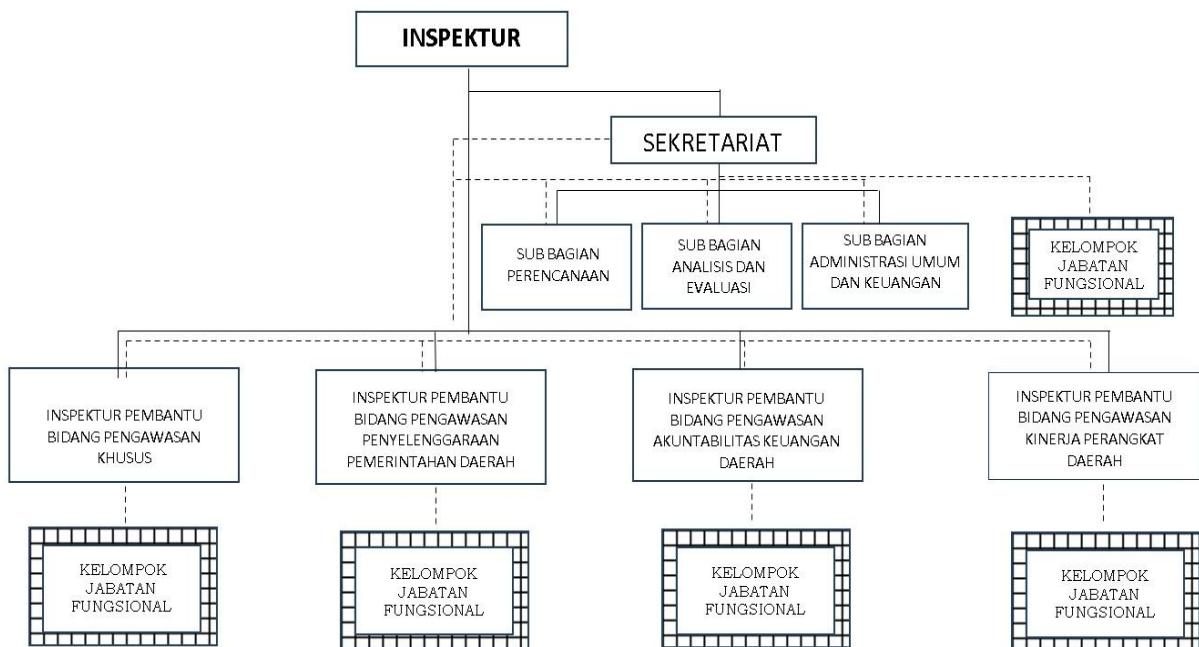
##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah digambarkan sebagaimana di bawah ini:



**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

### 2.1.3 Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa susunan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

#### 1. Inspektur

Tugas Inspektur adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Tugas Sekretariat adalah melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangan dan pengadministrasian kerja sama;

- c. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- g. pengkoordinasian peningkatan kapabilitas APIP;
- h. pengkoordinasian pencegahan korupsi; dan
- i. pengkoordinasian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan memiliki tugas:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan;
- 2) menyiapkan bahan pengkoordinasian program pengawasan dan penganggaran;
- 3) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Inspektorat;
- 4) menyusun bahan capaian dan pengendalian kinerja;
- 5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan;
- 6) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengusulan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi;

Subbagian Analisis dan Evaluasi memiliki tugas:

- 1) menyiapkan bahan dan pendokumentasian pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- 2) menyiapkan bahan administrasi pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- 3) mengkoordinasikan evaluasi pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- 4) menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- 5) mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 6) melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- 7) melaksanakan pengelolaan dan penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Inspektorat;
- 8) menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP;
- 9) menyusun laporan implementasi pengelolaan risiko di Lingkungan Inspektorat; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan memiliki tugas:

- 1) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 8) menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik;
- 9) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan pencegahan korupsi;
- 10) mengkoordinasikan pelaporan harta kekayaan ASN ;
- 11) mengkoordinasikan pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- 12) mengkoordinasikan kegiatan keprofesian pengawasan intern; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan sosialisasi, fasilitasi pelaporan dan verifikasi laporan harta kekayaan ASN;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- c. melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan laporan harta kekayaan ASN;
- h. melaksanakan *prouity audit*;
- i. melaksanakan audit investigasi;
- j. melaksanakan audit forensik;
- k. melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
- l. melaksanakan pengawasan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas pemenuhan indikator program dari KPK RI (*Monitoring, Controlling and Surveillance for Prevention* dan strategi nasional pencegahan korupsi dan/atau nama lain yang sejenis);

- m. melaksanakan pemeriksaan khusus atas hambatan kelancaran pembangunan daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas:
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
  - c. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
  - d. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
  - e. melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. melaksanakan reviu, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi;
  - g. melaksanakan evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah Provinsi;
  - h. melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
  - j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah;
  - k. melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi atas penilaian mandiri penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah memiliki tugas:
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah atas penugasan dari Gubernur;
  - c. melaksanakan reviu rencana kerja dan anggaran (RKA) murni dan perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - d. melaksanakan reviu KUA-PPAS;
  - e. melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);

- f. melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - g. melaksanakan audit bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
  - h. melaksanakan pemantauan transfer dana desa;
  - i. melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah  
 Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah memiliki tugas:
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan audit kinerja program prioritas pemerintah daerah;
  - c. melaksanakan audit kinerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. melaksanakan audit kinerja BUMD;
  - e. melaksanakan audit kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
  - f. melaksanakan audit Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
  - g. melaksanakan pengawasan ASN berbasis meritokrasi; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## **2.2 Sumber Daya Inspektorat**

### **2.2.1 Susunan Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut (data per 1 September 2025):

**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>								<b>Jumlah</b>
<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>	<b>D-III</b>	<b>D-IV</b>	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>	
-	-	13	1	4	78	43	0	139

**Tabel 2.2**  
 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
 Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
69	70	139

**Tabel 2.3**  
 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
 Berdasarkan Golongan

PNS																PPPK		
Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV				V	VII	IX
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
-	-	-	-	-	-	-	1	18	31	14	25	19	9	4	-	8	1	9

**Tabel 2.4**  
 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
 Berdasarkan Jabatan

Eselon			ASN				JFU Non ASN	Jumlah
			JF Auditor	JF PPUPD	JFU	PPPK		
II	III	IV						
0	4	3	55	32	27	12	6	139

**Tabel 2.5**  
 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor  
 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Jenjang Auditor	Jumlah Auditor
1.	Auditor Madya	11
2.	Auditor Muda	18
3.	Auditor Pertama	26

**Tabel 2.6**  
 Jumlah PPUPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Jenjang PPUPD	Jumlah PPUPD
1.	PPUPD Madya	12
2.	PPUPD Muda	6
3.	PPUPD Pertama	14

**Tabel 2.7**  
 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
 Yang Telah Bersertifikat

No	Sertifikasi	Jumlah
1.	Pengadaan Barang/Jasa (PB)	31
2.	Certified Forensic Auditor (CFrA)	18

3.	<i>Chartered Accountant (CA)</i>	12
4.	<i>Certified Risk Associate (CRA)</i>	12
5.	<i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	10
6.	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	8
7.	<i>Certified Government Risk Assurance (CGRA)</i>	4
8.	<i>Fraud Management Risk Professional (FMRP)</i>	1
9.	<i>Certified Government Accounting Associate (CGAA)</i>	1

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi sarana prasarana yang dapat dipakai dan dalam kondisi rusak, antara lain:

**Tabel 2.7**

Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana  
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	Sarana/Prasarana	Kondisi Tahun 2025	Kondisi yang diinginkan tahun 2029
1.	Gedung	6.270 M <sup>2</sup>	6.270 M <sup>2</sup>
2.	Kendaraan Dinas a) Roda 4 b) Roda 2	25 unit 11 unit	32 unit 15 unit
3.	Komputer	79 unit	95 unit
4.	Printer	85 unit	97 unit
5.	Koneksi Internet	24 jam	24 jam
6.	LCD	21 unit	29 unit
7.	Laptop/Notebook	35 unit	95 unit
8	Scanner	21 unit	29 unit

\*kondisi 2029 : data dari pengurus barang

### 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pencapaian kinerja tersebut akan tergambaran secara kualitatif dan/atau kuantitatif, bagaimana pelayanan Inspektorat telah dilaksanakan secara maksimal. Penjabaran target indikator Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mulai dari Tujuan, Sasaran hingga Program serta ketercapaiannya pada 5 (lima) tahun terakhir telah tertuang pada Tabel 2.8. Sementara Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dari 5 (lima) tahun terakhir tertuang dalam Tabel 2.9.

**Tabel 2.8**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>A Renstra PD Tahun 2018-2023</b>																					
1	Tujuan																				
a	Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	3	3	3	3	n/a	3	3	3	3	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	
b	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	-	-	-	3,20	3,30	3,18	3,19	n/a	2,85	3,12	3,27	3,46	n/a	91,94	94,55	102,83	108,00	n/a	
2	Sasaran																				
a	Level pada tiga elemen: 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level	-	-	-	3	3	3	3	n/a	3	3	3	3	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	
b	Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP: 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	-	-	-	3,10	3,20	3,30	3,18	3,19	2,85	3,12	3,27	3,46	n/a	91,94	94,55	102,83	108,00	n/a	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	Program																				
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 - 2021																					
a	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																				
1)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	n/a
2)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	n/a
3)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	n/a
4)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	n/a
5)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	n/a
6)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II	%	-	-	-	100,00	101,61	n/a	n/a	n/a	100,00	101,61	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
8)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III	%	-	-	-	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a
9)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	104,84	n/a	n/a	n/a	100,00	104,84	n/a	n/a	n/a
10)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
11)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan	%	-	-	-	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a
12)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
b	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase APIP berlisensi nasional/internasional	%	-	-	-	40,00	190,00	n/a	n/a	n/a	40,00	190,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
2)	Nilai Budaya Integritas	Nilai	-	-	-	80,00	92,49	n/a	n/a	n/a	85,93	92,49	n/a	n/a	n/a	107,41	100,00	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3)	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	Indeks	-	-	-	87,35	87,11	n/a	n/a	n/a	87,43	87,11	n/a	n/a	n/a	100,09	100,00	n/a	n/a	n/a
4)	Percentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 - 2023																				
a	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																			
1)	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	127,06	95,41	n/a	n/a	n/a	149,48	112,25	n/a
2)	Percentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	112,50	162,50	n/a	n/a	n/a	132,35	191,18	n/a
3)	Percentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	122,78	121,52	n/a	n/a	n/a	144,45	142,96	n/a
4)	Percentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	114,81	121,87	n/a	n/a	n/a	135,07	143,38	n/a
5)	Percentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	127,27	227,27	n/a	n/a	n/a	149,73	267,38	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	-	-	-	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a
2)	Persentase Penerapan MR di OPD	%	-	-	-	n/a	n/a	10,00	100,00	n/a	n/a	n/a	10,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a
3)	Nilai <i>Self Assessment</i> RB Provinsi	Nilai	-	-	-	n/a	n/a	85,00	86,00	n/a	n/a	n/a	88,35	88,38	n/a	n/a	n/a	103,94	102,77	n/a
4)	Persentase Nilai MCP korsupgah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	94,02	89,35	n/a	n/a	n/a	110,61	105,12	n/a
5)	Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	-	-	-	n/a	n/a	75,00	10,00	n/a	n/a	n/a	84,20	15,75	n/a	n/a	n/a	112,27	157,50	n/a
<b>B Renstra PD Tahun 2024-2026</b>																				
1	Tujuan																			
a	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	-	-	-	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00
b	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	n/a	n/a	n/a	76,00	n/a	n/a	n/a	82,09	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	108,01
2	Sasaran																			
a	Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00
3	Program																			
a	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																			
1)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	83,00	n/a	n/a	n/a	n/a	95,95	n/a	n/a	n/a	n/a	115,60	
2)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	83,05	n/a	n/a	n/a	n/a	97,71	
3)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	43,67	n/a	n/a	n/a	n/a	51,38	
4)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	59,31	n/a	n/a	n/a	n/a	69,78	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	68,14	n/a	n/a	n/a	n/a	80,16
b	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	20,41	n/a	n/a	n/a	n/a	40,82	n/a	n/a	n/a	n/a	200,00
2)	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	10,20	n/a	n/a	n/a	n/a	18,37	n/a	n/a	n/a	n/a	180,10

Dari tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 di atas dapat dilihat Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024-2026. Pada rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 terdapat dua rentang waktu dalam penetapan indikator kinerja yaitu:

- a. Rentang waktu tahun 2019 – 2021 terdapat 2 (dua) indikator tujuan, 2 (dua) indikator sasaran dan 16 (enam belas) indikator program yaitu:
  1. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I;
  2. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I;
  3. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I;
  4. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II;
  5. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II;
  6. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II;
  7. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III;
  8. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III;
  9. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III;
  10. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya;
  11. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan;
  12. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan;
  13. Persentase APIP berlisensi nasional/ internasional;
  14. Nilai Budaya Integritas;
  15. Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas; dan
  16. Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko.
- b. Rentang waktu tahun 2022 – 2023, terdapat perubahan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah khususnya pada indikator kinerja program sehingga terdapat 2 (dua) indikator tujuan, 2 (dua) indikator sasaran dan 10 (sepuluh) indikator program yaitu sebagai berikut:
  1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
  2. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus;
  3. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
  5. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
  6. Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi;
  7. Persentase Penerapan MR di OPD;
  8. Nilai *Self Assessment* RB Provinsi;
  9. Persentase Nilai MCP korsupgah; dan
  10. Persentase Capaian Aksi Stranas PK.

Perubahan tersebut dalam rangka menindaklanjuti adanya:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan

usulan perubahan struktur organisasi dan tata Kelola yang semula berdasarkan kewilayahan yaitu Inspektur Pembantu Khusus, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III menjadi berdasarkan urusan yang terdiri dari Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah; dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan

- b. Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur program, kegiatan serta tambahan nomenklatur sub kegiatan yang berpengaruh pada penetapan indikator kinerja di level aktivitas yaitu pada kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka perubahan cascading dan pohon kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maka terdapat perubahan indikator kinerja pada rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Perubahan tersebut menjadi 2 (dua) indikator tujuan, 2 (dua) indikator sasaran dan 7 (tujuh) indikator program antara lain:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri;
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu;
3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
5. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
6. Persentase perangkat daerah yang mendapat Manajemen Risiko Indeks (MRI) level 3;
7. Persentase perangkat daerah yang mendapat Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) level 3.

Berdasarkan Tabel 2.8 selama tahun 2020-2024 secara umum indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai target yang ditetapkan meskipun terjadi perubahan indikator pada kurun waktu tersebut. Berikut indikator kinerja yang tercapai pada akhir tahun 2024:

1. Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan target Level 3 dan capaian Level 3;
2. Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) dengan target 76,00 dan capaian 82,09;
3. Level Kapabilitas APIP dengan target Level 3 dan capaian Level 3;
4. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah dengan target Level 3 dan capaian Level 3;

5. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri dengan target 83,00% dan capaian 95,95%;
6. Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 dengan target 20,41% dan capaian 40,82%; dan
7. Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3 dengan target 10,20% dan capaian 18,37%.

Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pendampingan SPIP dan manajemen risiko serta Reformasi Birokrasi kepada perangkat daerah;
2. Pemantauan TLHP BPK RI dan Itjen Kemendagri yang sudah terdigitalisasi;
3. Sudah ditindaklanjutinya rekomendasi terkait Kapabilitas APIP dari BPKP.

Namun demikian, terdapat indikator kinerja pada level program yang masih di bawah target, yaitu:

1. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu dengan target 85,00% dan capaian 83,05%;
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target 85,00% dan capaian 43,67%;
3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dengan target 85,00% dan capaian 59,31%;
4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah dengan target 85,00% dan capaian 68,14%.

Faktor-faktor yang menghambat pencapaian indikator kinerja di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu yang lama untuk ditindaklanjuti;
2. Pelaksanaan monitoring TLHP belum memadai dengan aplikasi yang sudah dimiliki;
3. Penguatan SDM APIP belum optimal;
4. Nilai total anggaran pengawasan belum mencapai 0,3 % dari APBD;
5. Kekurangan SDM dalam pelaksanaan pengawasan.

**Tabel 2.9**  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja	64.220 .370	65.969 .264	71.513 .228	75.076 .360	42.774 .439	31.322 .520	30.627 .046	32.177 .566	37.919 .296	39.563 .390	31.047 .790	29.792 .275	31.886 .633	37.708 .528	38.814 .001	99,12	97,27	99,10	99,44	98,11	4,78	4,57
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.9 di atas menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.31.322.520.000,00 dan tahun 2021 menjadi sebesar Rp.30.627.046.000,00 akibat *refocusing* pada masa pandemi Covid-19. Untuk tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.32.177.566.000,00 dan selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp.37.919.296.000,00 karena adanya usulan penggantian sarana prasarana kantor yaitu lift yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Untuk tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp.39.563.390.000,00.

Capaian penyerapan anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tergolong “sangat baik” dari tahun 2020 hingga 2024 dengan realisasi anggaran di atas 95%.

## 2.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, dilakukan pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah, serta akar penyebabnya. Pemetaan ini menjadi penting karena dapat membantu mengidentifikasi titik lemah yang selama ini menghambat optimalisasi peran Inspektorat dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.

**Tabel 2.10**  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengawasan belum optimal.	<p>Hasil pengawasan belum memberikan dampak/nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.</p>	<p>Penyelenggaraan manajemen risiko Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah belum efektif menurunkan level risiko.</p> <p>Pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah belum membudayakan pemanfaatan informasi risiko untuk mengambil keputusan/kebijakan.</p> <p>Ukuran kinerja pemerintah daerah/perangkat daerah kurang menggambarkan kinerja sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan, serta sebagian masih menggunakan indikator dari pihak ketiga (misalnya BPS).</p> <p>Kompetensi APIP belum mengikuti perkembangan keilmuan/pengetahuan teknis yang selalu berkembang.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Profesionalitas APIP belum sepenuhnya memenuhi standar pengawasan.
			Orientasi pengawasan masih di aktivitas <i>assurance</i> , belum optimal menjalankan peran konsultatif
		Pencegahan korupsi belum optimal	Belum seluruh rekomendasi selesai ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC)
			Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan kurang optimal
			Pembangunan anti korupsi belum optimal

## **2.5 Isu Strategis Inspektorat**

Isu strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencakup kebutuhan penguatan pengawasan intern yang belum maksimal seiring transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, sehingga peran APIP dalam *advisory* serta mitigasi risiko masih rendah dan perlu menjadi perhatian bagi pemimpin daerah; terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan dukungan kelembagaan/regulasi yang belum memadai menambah tantangan dalam implementasi teknologi informasi (misalnya e-audit), riset foresight untuk kebijakan daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola berbasis informasi; di samping itu, tantangan lain meliputi rendahnya efektivitas penerapan manajemen risiko, kebutuhan peningkatan kapasitas advisory dan *risk-based audit*, serta perlunya budaya integritas yang kuat, koordinasi antar lembaga yang lebih baik, dan penerapan sistem pengawasan internal yang terintegrasi untuk menjadikan APIP sebagai early warning system dalam mendeteksi penyimpangan dan mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah.

**Tabel 2.11**  
Perumusan Isu Strategis Inspektorat

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan pengawasan intern pemerintah	Pengawasan belum memberikan dampak yang maksimal pada mitra/auditan dan belum dapat memberikan masukan kepada pemimpin daerah	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek strategik, <i>insight &amp; foresight</i> (AAPI 2024)		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke depan dengan berbagai alternatif ( <i>foresight</i> ) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah
Penguatan pengawasan intern pemerintah	Peran APIP dalam fungsi <i>advisory</i> dan mitigasi risiko belum optimal akibat keterbatasan sumber daya (5M)	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal	Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk memiliki kompetensi dalam	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, substansi, kompetensi,		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		daerah yang belum optimal	<i>advisory</i> dan <i>risk-based audit</i> , yang saat ini masih menjadi tantangan bagi APIP di Indonesia	serta regulasi (AAIPI 2024)		dengan berbagai alternatif ( <i>foresight</i> ) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah
Pemanfaatan Infrastruktur teknologi informasi (e.g., sistem e-audit)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan manajerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal: - Sistem pengawasan berbasis teknologi belum terintegrasi - Belum ada kebijakan internal untuk mewajibkan penggunaan teknologi informasi	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk menerapkan teknologi informasi dalam audit intern dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi tersebut	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, substansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2024)		Penerapan teknologi informasi (misalnya <i>e-audit</i> ) dalam pengawasan intern

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korupsi	Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik karena belum adanya roadmap pembangunan budaya integritas	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal			Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi (Laporan SPI 2024)	Peningkatan peran Inspektorat sebagai <i>early warning system</i> dalam mendeteksi penyimpangan
Peningkatan efektivitas pengendalian internal Pemprov Jateng	a. Implementasi manajemen risiko masih bersifat administratif sehingga belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal			Tren nilai SPIP Terintegrasi meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2024 tetapi masih ditemukan	Mendorong pengawas intern untuk menjadi <i>trusted advisor</i> bagi organisasi dalam menghadapi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	keputusan b. Rencana tindak pengendalian (RTP) yang dirancang belum sepenuhnya diimplementasikan dan belum sepenuhnya efektif menurunkan risiko	daerah yang belum optimal			adanya temuan berulang	berbagai permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pelayanan Inspektorat	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal		Arahan Presiden Prabowo terkait Reformasi Birokrasi: 1. Responsivitas Birokrasi 2. Reformasi Pelayanan Publik 3. Efektivitas Alokasi Anggaran 4. Pelayanan		Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan pembangunan integritas

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				Berbasis Teknologi 5. Pengelolaan SN 6. Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran 7. Percepatan Implementasi Kebijakan 8. Penguatan Koordinasi Antar lembaga		

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil identifikasi isu strategis dan kesepakatan forum perangkat daerah. Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dijalankan. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

##### **a. Tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Inspektorat.

##### **b. Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**

1. Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Inspektorat;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Inspektorat.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun							Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Angka	3,464	3,471	3,5	3,52	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6	
			Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal											
			Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,06	3,02	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4	4	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun							Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3	3,096	3,146	3,196	3,246	3,296	3,346	3,396	3,396	
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	81,03	82,09	82,79	83,49	84,1	84,89	85,59	85,59	85,59	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT												
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	3,181	3,31	3,32	3,35	3,38	3,41	3,45	3,5	3,5	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun							Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT												
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	88,5	84,25	84,7 5	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,25	

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**

Strategi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang sistematis yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sedangkan arah kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah periode 2025 - 2029, maka telah dirumuskan 5 (lima) strategi dan 5 (lima) arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal	1. Menguatkan fondasi pengawasan; 2. Meningkatkan Profesionalisasi dan Relevansi Pengawasan; 3. Transformasi Digital Pengawasan;	Memperkuat kapasitas dasar APIP dan sistem pengawasan internal;
		4. Pengawasan Kolaboratif dan Partisipatif;	Meningkatkan kapasitas dan relevansi APIP dalam memberikan <i>insight</i> untuk pengambilan keputusan strategis.
		5. Konsolidasi Dampak & Arah Baru Pengawasan Proaktif	Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan
			Menguatkan budaya antikorupsi melalui kolaborasi multipihak dalam pendidikan antikorupsi bagi ASN dan pemerintah desa
			Memastikan keberlanjutan hasil pengawasan dan merancang transformasi pengawasan ke depan

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Prioritas dalam setiap tahapan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pentahapan yang dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pentahapan Renstra Perangkat Daerah**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>				
<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>  <b>Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah</b>	<b>Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah</b>	<b>Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah</b>
Pentahapan RPJMD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;</li> <li>• penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabilitas APIP;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan dan pemerataan pengembangan kompetensi serta internalisasi nilai anti korupsi dan integritas kepada seluruh penyelenggara pemerintahan;</li> <li>• peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kompetensi diarahkan untuk menumbuhkan daya saing penyelenggara pemerintahan dengan mendorong kemudahan akses belajar dengan mengedepankan nilai-nilai anti korupsi;</li> <li>• penumbuhan kesadaran pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kompetensi penyelenggara pemerintahan yang dan nilai-nilai anti korupsi serta integritas;</li> <li>• pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta bebas korupsi yang mendukung Tata Kelola Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan;</li> </ul>
Aktivitas Prioritas Perangkat Daerah				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan kompetensi seluruh APIP (gap analysis)</li> <li>• Pelatihan dasar audit berbasis risiko, audit kepatuhan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan</li> <li>• Penerapan mekanisme pengawasan tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pengawasan berbasis risiko untuk program strategis/prioritas daerah.</li> <li>• Penyusunan laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penggunaan sistem audit elektronik</li> <li>• Pembuatan tampilan informasi pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi menyeluruh hasil pengawasan</li> <li>• Penyusunan roadmap pengawasan 2031-2035 berbasis risiko</li> </ul>

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dan audit kinerja</li> <li>• Pelatihan foresight dan analisis kebijakan</li> <li>• Uji sertifikasi bagi APIP</li> <li>• Revisi dan simplifikasi SOP pengawasan untuk memperjelas peran APIP di tiap jenis audit</li> <li>• Digitalisasi arsip dokumen pengawasan dan referensi regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berbasis prioritas pembangunan daerah</li> <li>• Penyusunan PKPT dengan pendekatan risiko (Risk-Based Audit Planning)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengawasan yang memberikan insight strategis kepada pengambil keputusan.</li> <li>• Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pengawasan dan feedback dari pengambil keputusan melalui analisis kinerja tindak lanjut pengawasan.</li> <li>• Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan APH, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK</li> <li>• Forum pengawasan antara APIP, APH, KPK, BPK, OPD, NGO, dan Masyarakat</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD dan BLUD</li> <li>• Evaluasi rencana aksi dan titik rawan kejadian korupsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berbasis tema untuk memudahkan dalam melihat hasil pengawasan berdasarkan topik atau isu tertentu</li> <li>• Audit yang menggunakan data dan aplikasi untuk analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>strategis daerah dan harapan publik</li> </ul>

### 3.3 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Proses manajemen risiko seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra PD. Sedangkan untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.5**

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD 1	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD 2	Pernyataan Risiko 3	Skala Risiko 4	Sebab 5	Dampak 6	Rencana Tindak Pengendalian 7	Penanggung Jawab 8	Target Waktu Penyelesaian 9
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendaian yang efektif	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai indeks SPIP menurun	15	Tim pemeriksa kurang adaptif atas perubahan regulasi atau standar penilaian SPIP dari BPKP	Perangkat daerah gagal menyesuaikan	Menyusun Juknis pelaksanaan PM SPIP tingkat Perangkat Daerah sebagai panduan Perangkat Daerah	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran								
Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	perolehan nilai IEPK tiap perangkat daerah dibawah 3	10	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	evaluasi atas pelaksanaan aturan/ pedoman teknis pengendalian korupsi melalui SPIP Terintegrasi	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Rekomendasi hasil pemeriksaan tidak mampu memberikan <i>insight</i> dalam pengambilan keputusan	10	Hasil pengawasan disajikan dalam format panjang dan rumit, sulit dipahami pimpinan	Rekomendasi diabaikan atau hanya ditindaklanjuti secara administratif.	Penyusunan <i>executive summary</i> hasil pengawasan untuk kepala daerah	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Tujuan								
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Inspektorat	Implementasi RB parsial dan tidak terintegrasi	15	RB dianggap hanya urusan sekertariat/ Inspektorat, bukan tanggungjawab semua	Indeks Reformasi Birokrasi tidak mencerminkan kondisi riil	Menyusun rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran								
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Ulasan negatif pelanggan di situs ulasan publik	10	Perilaku pegawai yang tidak sesuai NSPK ASN	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Penerapan Whistleblowing System (WBS) internal untuk melaporkan pelanggaran perilaku	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Adanya risiko strategis yang tidak teridentifikasi	10	Kurangnya komitmen UPR dalam mengidentifikasi risiko	Berpotensi terjadi permasalahan yang tidak ada tindak pengendaliannya	Melakukan FGD dan brainstorming saat penyusunan Risk Register	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 – 2029. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan 3 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan yaitu:

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, yang terdiri atas:
  - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
  - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
    - 2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
    - 3) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang terdiri atas:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;
    - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
    - 3) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
    - 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - 3) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
    - 4) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN;
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
  - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pengadaan Mebel;
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya; dan
  - 5) Pengadaan Aset Tak Berwujud.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pemeliharaan Mebel;
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 4) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

- 5) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penentuan secara lengkap program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1.1**

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif *												8.524.520.000		8.524.520.000		9.524.520.000		13.829.520.000		17.154.520.000	INSPEKTOR AT			
							Nilai Maturitas Penyelegaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi *	Angka	3,471	3,5	3,52		3,54		3,56		3,58		3,6			INSPEKTOR AT		
Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal **												8.524.520.000		8.524.520.000		9.524.520.000		13.829.520.000		17.154.520.000	INSPEKTOR AT			
							Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) **	Angka	3,02	3,2	3,4	6.874.520.000	3,6	6.874.520.000	3,7	7.874.520.000	3,8	10.179.520.000	4	11.454.520.000	INSPEKTOR AT			
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									240.000.000		240.000.000		240.000.000		320.000.000		420.000.000	INSPEKTOR AT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti ***	%	95,79	95,79	96,23	240.000 .000	96,58	240.000.000	96,82	240.000 .000	97	320.000.000	97,1	420.000 .000	INSPEKTOR AT				
		6.01.02.1.01		Penyelenggaran Pengawasan Internal ****							240.000 .000		240.000 .000		240.000 .000		320.000.000		420.000 .000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Audit dan Iktisar Hasil Pemeriksaan ****	Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut dan Iktisar Hasil Pemeriksaan ****	Dokumen	N/A	N/A	14	240.000 .000	14	240.000 .000	14	240.000 .000	14	320.000.000	14	420.000 .000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI				
		6.01.02.1.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP *****							240.000 .000		240.000 .000		240.000 .000		320.000.000		420.000 .000	INSPEKTOR AT				
					Terlaksanaanya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Dokumen	70	70	92	240.000 .000	92	240.000 .000	92	240.000 .000	92	320.000.000	92	420.000 .000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	INSP EKTO RAT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Pemeriksaan APIP	Pemeriksaan APIP ****																	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									1.495.9 40.000		1.495. 940. 000			1.745.9 40.000		2.245.940 .000		2.495.9 40.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH		
						Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang akuntabilitas keuangan daerah	Percentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah ***	%	N/A	N/A	100	1.495.9 40.000	100	1.495. 940. 000	100	1.745.9 40.000	100	2.245.940 .000	100	2.495.9 40.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH			
		6.01.02.1.01	Penyelenggaran Pengawasan Internal ****									1.495.9 40.000		1.495. 940. 000			1.745.9 40.000		2.245.940 .000		2.495.9 40.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH		
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan,	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan,	Dokumen	N/A	N/A	100	1.495.9 40.000	100	1.495. 940. 000	100	1.745.9 40.000	100	2.245.940 .000	100	2.495.9 40.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						rekомendasi , dan rencana aksi	rekomendas i, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terbit ****														KEUANGAN DAERAH			
		6.01. 02.1. 01.00 02			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah *****						1.495.9 40.000		1.495 .940. 000		1.745.9 40.000		2.245.940 .000		2.495.9 40.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH			
						Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah ****	Laporan	42	42	80	1.495.9 40.000	80	1.495 .940. 000	80	1.745.9 40.000	80	2.245.940 .000	80	2.495.9 40.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	INSP EKTU R PEM BANT U BIDA NG PENG AWA SAN AKUN TABI LITAS KEUA NGA N DAER AH		
		6.01. 02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWASA N ***								1.296.0 20.000		1.296 .020. 000		1.546.0 20.000		2.046.020 .000		2.296.0 20.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN KHUSUS			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan khusus	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus ***	%	N/A	N/A	100	1.296.0 20.000	100	1.296. .020. 000	100	1.546.0 20.000	100	2.046.020 .000	100	2.296.0 20.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS			
		6.01. 02.1. 02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ****								1.296.0 20.000		1.296. .020. 000		1.546.0 20.000		2.046.020 .000		2.296.0 20.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS			
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan, rekomendasi, dan rencana aksi	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi bidang Pengawasan Khusus yang terbit ****	Dokumen	N/A	N/A	23	1.296.0 20.000	23	1.296. .020. 000	23	1.546.0 20.000	23	2.046.020 .000	23	2.296.0 20.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS			
		6.01. 02.1. 02.00 02			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu *****							1.296.0 20.000		1.296. .020. 000		1.546.0 20.000		2.046.020 .000		2.296.0 20.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS			
						Terlaksanaanya Pengawasan dengan Tujuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan	Laporan	24	20	23	1.296.0 20.000	23	1.296. .020. 000	23	1.546.0 20.000	23	2.046.020 .000	23	2.296.0 20.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	INSP EKTU R PEM BANT U		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Tujuan Tertentu	Tertentu ****																BIDANG PENGAWASAN KHUSUS		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									1.877.120.000		1.877.120.000		2.127.120.000		2.627.120.000		2.877.120.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
					Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ***	%	N/A	N/A	100	1.877.120.000	100	1.877.120.000	100	2.127.120.000	100	2.627.120.000	100	2.877.120.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			
		6.01.02.1.01	Penyelenggaran Pengawasan Internal ****									1.877.120.000		1.877.120.000		2.127.120.000		2.627.120.000		2.877.120.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan, rekomendasi , dan rencana aksi	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi , dan rencana aksi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit ****	Dokumen	N/A	N/A	64	1.877.120.000	64	1.877.120.000	64	2.127.120.000	64	2.627.120.000	64	2.877.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			
		6.01. 02.1. 01.00 05			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota ****							1.877.120.000		1.877.120.000		2.127.120.000		2.627.120.000		2.877.120.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			
					Terlaksanaanya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota *****	Laporan	30	30	100	1.877.120.000	100	1.877.120.000	100	2.127.120.000	100	2.627.120.000	100	2.877.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INSP EKTU R PEM BANT U BIDA NG PENG AWASAN PEN YELLEN GGA RAAN PEM ERIN TAHA N			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
																						DAERAH		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									1.890.440.000		1.890.440.000		2.140.440.000		2.640.440.000		2.890.440.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		
						Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah ***	%	N/A	N/A	100	1.890.440.000	100	1.890.440.000	100	2.140.440.000	100	2.640.440.000	100	2.890.440.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		
		6.01.02.1.01	Penyelenggaran Pengawasan Internal ****									1.890.440.000		1.890.440.000		2.140.440.000		2.640.440.000		2.890.440.000		INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan, rekomendasi, dan rencana aksi	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan	Dokumen	N/A	N/A	80	1.890.440.000	80	1.890.440.000	80	2.140.440.000	80	2.640.440.000	80	2.890.440.000		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
							Kinerja Perangkat Daerah yang terbit ****																	
		6.01. 02.1. 01.00 01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ****							1.890.4 40.000		1.890 .440. 000			2.140.4 40.000		2.640.440 .000		2.890.4 40.000	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		
						Terlaksanaanya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ****	Laporan	50	50	64	1.890.4 40.000	64	1.890 .440. 000	64	2.140.4 40.000	64	2.640.440 .000	64	2.890.4 40.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	INSP EKTU R PEM BANT U BIDA NG PENG AWA SAN KINE RJA PERA NGK AT DAER AH		
		6.01. 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI ***									75.000. 000		75.00 0.000		75.000. 000		300.000.0 00		475.000 .000	INSPEKTOR AT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT ***	%	N/A	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	300.000.000	100	475.000.000	INSPEKTOR AT			
		6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ****								75.000.000		75.000.000		75.000.000		300.000.000		475.000.000	INSPEKTOR AT			
						Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ***	Dokumen	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	300.000.000	1	475.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN			
		6.01.03.1.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan ****								75.000.000		75.000.000		75.000.000		300.000.000		475.000.000	INSPEKTOR AT			
						Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun *****	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun *****	Rekomendasi	N/A	N/A	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	300.000.000	1	475.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSP EKTO RAT		
						Indeks Efektivitas Pengendalian	Angka	3,096	3,146	3,196	1.650.000.000	3,246	1.650.000.000	3,296	1.650.000.000	3,346	3.650.000	3,396	5.700.000.000	INSPEKTOR AT				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
							n Korupsi (IEPK) **																	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI ***								1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		3.650.000.000		5.700.000.000		INSPEKTOR AT			
							Meningkatnya kapabilitas pengelolaan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3 ***	%	N/A	35,71	35,71	950.000.000	42,86	950.000.000	50	950.000.000	57,14	2.000.000.000	64,29	3.000.000.000	INSPEKTOR AT		
		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi ****								950.000.000		950.000.000		950.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		INSPEKTOR AT			
							Tersusunnya laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah ****	Laporan	N/A	3	3	950.000.000	3	950.000.000	3	950.000.000	3	2.000.000.000	3	3.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN		
		6.01.03.1.02.00.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi *****								950.000.000		950.000.000		950.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000		INSPEKTOR AT			
							Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Kegiatan	N/A	9	9	950.000.000	9	950.000.000	9	950.000.000	9	2.000.000.000	9	3.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	INSP EKTO RAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Pemberantasan Korupsi	dan Pemberantasan Korupsi ****																	
						Meningkatnya penguatan integritas di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas ***	%	N/A	42,85	42,85	350.000 .000	52,38	350.000.000	69,05	350.000 .000	76,19	400.000.000	100	450.000 .000	INSPEKTOR AT			
	6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi ***									350.000 .000		350.000.000		350.000 .000		400.000.000		450.000 .000	INSPEKTOR AT			
						Tersusunnya laporan hasil evaluasi pengajuan ZI OPD dan BLUD	Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD ****	Laporan	N/A	8	8	350.000 .000	8	350.000.000	8	350.000 .000	8	400.000.000	8	450.000 .000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI			
	6.01.03.1.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas *****									350.000 .000		350.000.000		350.000 .000		400.000.000		450.000 .000	INSPEKTOR AT			
						Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas *****	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas *****	Perangkat Daerah	N/A	8	8	350.000 .000	8	350.000.000	8	350.000 .000	8	400.000.000	8	450.000 .000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	INSP EKTO RAT		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Meningkatnya penguatan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80 ***	%	N/A	61,9	61,9	350.000 .000	69,05	350.000 .000	76,19	350.000 .000	83,33	1.250.000 .000	90,48	2.250.000 .000	INSPEKTOR AT			
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi ****								350.000 .000		350.000 .000		350.000 .000		1.250.000 .000		2.250.000 .000	INSPEKTOR AT			
						Tersusunnya laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah ****	Laporan	N/A	84	84	350.000 .000	84	350.000 .000	84	350.000 .000	84	1.250.000 .000	84	2.250.000 .000	SUB BAGIAN PERENCANAAN			
		6.01.03.1.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi *****								350.000 .000		350.000 .000		350.000 .000		1.250.000 .000		2.250.000 .000	INSPEKTOR AT			
						Terlaksanaanya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi *****	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi *****	Perangkat Daerah	N/A	42	42	350.000 .000	42	350.000 .000	42	350.000 .000	42	1.250.000 .000	42	2.250.000 .000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSP EKTO RAT		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat												31.323.014.000		31.72		35.233.790.000		43.574.305.000		46.296.707.000	INSPEKTOR AT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT *														1.490 .000										
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTOR AT *	Angka	82,09	82,79	83,49		84,1		84,89		85,59		85,59		INSPEKTOR AT			
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT **												208.334 .000		208.3 34.00 0		208.334 .000		705.000.0 00		795.000 .000	INSPEKTOR AT			
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTOR AT **	Angka	3,31	3,32	3,35	208.334 .000	3,38	208.3 34.00 0	3,41	208.334 .000	3,45	705.000.0 00	3,5	795.000 .000	INSPEKTOR AT			
	X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***										208.334 .000		208.3 34.00 0		208.334 .000		705.000.0 00		795.000 .000	INSPEKTOR AT			
							Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di INSPEKTOR AT	Percentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTOR AT ***	%	N/A	100	100	208.334 .000	100	208.3 34.00 0	100	208.334 .000	100	705.000.0 00	100	795.000 .000	INSPEKTOR AT		
	X.XX. 01.1. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja										208.334 .000		208.3		208.334 .000		705.000.0 00		795.000 .000	INSPEKTOR AT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Perangkat Daerah ****										34.000										
					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	100	208.334.000	100	208.334.000	100	208.334.000	100	705.000.000	100	795.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN			
		X.XX.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****								83.334.000		83.334.000		83.334.000		500.000.000		550.000.000	INSPEKTOR AT			
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****	Dokumen	6	9	9	83.334.000	9	83.334.000	9	83.334.000	9	500.000.000	9	550.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi			
		X.XX.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****								45.000.000		45.000.000		45.000.000		125.000.000		165.000.000	INSPEKTOR AT			
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****	Laporan	2	2	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	125.000.000	2	165.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi			
		X.XX.01.1.01.0008		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****								40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	INSPEKTOR AT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
							Terlaksanaanya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah ****	Data	N/A	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSP EKTORAT		
		X.XX. 01.1. 01.00 10					Penyelenggaran Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	INSPEKTORAT			
							Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ****	Dokumen	N/A	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSP EKTORAT		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT **											31.114.680.000		31.513.156.000		35.025.456.000		42.869.305.000		45.501.707.000	INSPEKTORAT			
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT **	Angka	84,25	84,75	85,25	31.114.680.000	85,75	31.513.156.000	86,25	35.025.456.000	86,75	42.869.305.000	87,25	45.501.707.000	INSPEKTORAT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								31.114.680.000		31.513.156.000		35.025.456.000		42.869.305.000		45.501.707.000	INSPEKTOR AT				
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di INSPEKTOR AT ***	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di INSPEKTOR AT ***	%	N/A	100	100	31.114.680.000	100	31.513.156.000	100	35.025.456.000	100	42.869.305.000	100	45.501.707.000	INSPEKTOR AT				
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								24.542.857.000		24.742.857.000		24.842.857.000		30.199.305.000		31.050.000.000	INSPEKTOR AT				
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	2	2	24.542.857.000	2	24.742.857.000	2	24.842.857.000	2	30.199.305.000	2	31.050.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN				
		X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****								24.522.857.000		24.722.857.000		24.822.857.000		30.149.305.000		31.000.000.000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	138	139	139	24.522.857.000	139	24.722.857.000	139	24.822.857.000	139	30.149.305.000	139	31.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			
		X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan								20.000.000		20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000	INSPEKTOR AT				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Akhir Tahun SKPD ****																			
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****	Laporan	N/A	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		450.000.000		550.000.000	INSPEKTORAT				
					Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	2	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	450.000.000	2	550.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN				
		X.XX.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		220.000.000	INSPEKTORAT				
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****	Dokumen	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	220.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		X.XX. 01.1. 03.00 02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							250.000 .000		250.000 .000		250.000 .000		300.000.00		330.000 .000	INSPEKTOR AT				
					Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	250.000 .000		1	250.000 .000		1	300.000.00		1	330.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***							605.000 .000		605.000 .000		852.599 .000		1.340.000 .000		1.582.500.000	INSPEKTOR AT				
					Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	N/A	100	100	605.000 .000		100	605.000 .000		100	852.599 .000		100	1.340.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN			
		X.XX. 01.1. 05.00 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	0	INSPEKTOR AT			
					Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	N/A	0		N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1.		Pendaatan dan Pengolahan Administrasi							40.000.000		40.000 .000		40.000.000		40.000.000		42.500.000	INSPEKTOR AT				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		05.00 03			Kepegawaian ****																			
					Terlaksana ny Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawai an ****	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawai an ****	Dokume n	1	1	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	42.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			
		X.XX. 01.1. 05.00 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****						565.000.000		565.000.000		712.599.000		1.000.000.000		1.100.000.000	INSPEKTOR AT				
					Terlaksana ny Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ****	Orang	50	50	40	565.000.000	40	565.000.000	40	712.599.000	40	1.000.000.000	40	1.100.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			
		X.XX. 01.1. 05.00 11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ****						0		0		100.000.000		300.000.000		440.000.000	INSPEKTOR AT				
					Terlaksana ny Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ****	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ****	Orang	N/A	N/A	0	0	N/A	0	160	100.000.000	160	300.000.000	160	440.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1.590.00.000		1.590.000.000		2.010.00.000		2.460.000.000		3.040.00.000	INSPEKTOR AT				
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****		Percentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	100	1.590.00.000	100	1.590.000.000	100	2.010.00.000	100	2.460.000.000	100	3.040.00.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN			
		X.XX.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		110.000.000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	X.XX. 01.1. 06.00 04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****							250.000 .000		250.000 00.000			250.000 .000		350.000.00		450.000 .000	INSPEKTOR AT		
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ****	Paket	N/A	N/A	1	250.000 .000		1	250.000 00.000		1	250.000 .000		350.000.00		450.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
	X.XX. 01.1. 06.00 05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****							150.000 .000		150.000 00.000			150.000 .000		150.000.00		160.000 .000	INSPEKTOR AT		
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ****	Paket	N/A	N/A	1	150.000 .000		1	150.000 00.000		1	150.000 .000		150.000.00		160.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
	X.XX. 01.1. 06.00 06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ****							10.000.000		10.000 00.000			10.000 .000		10.000.00		10.000 .000	INSPEKTOR AT		
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ****	Dokumen	1	1	1	10.000.000		1	10.000 00.000		1	10.000 .000		10.000.00		10.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	X.XX. 01.1. 06.00 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu ****								350.000 .000		350.0 00.00 0		500.000 .000		500.000.00		500.000 .000	INSPEKTOR AT			
					Terlaksana ny Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ****	Laporan	1	1	1	350.000 .000		1	350.0 00.00 0		1	500.000 .000		1	500.000.00	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
	X.XX. 01.1. 06.00 09			Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****								480.000 .000		480.0 00.00 0		600.000 .000		600.000.00		800.000 .000	INSPEKTOR AT			
					Terlaksana ny Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	1	1	1	480.000 .000		1	480.0 00.00 0		1	600.000 .000		1	800.000.00	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
	X.XX. 01.1. 06.00 11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****								50.000.000		50.00 0.000		200.000 .000		500.000.00		660.000 .000	INSPEKTOR AT			
					Terlaksana ny Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD ****	Dokume n	1	1	1	50.000.000		1	50.00 0.000		1	200.000 .000		1	500.000.00		660.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		X.XX. 01.1. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								250.000 .000		250.000.000			2.600.000.000			3.150.000 .000		3.510.000.000	INSPEKTOR AT	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset ****		Unit	N/A	6	6	250.000 .000	6	250.000.000	6	2.600.000.000	6	3.150.000 .000	5	3.510.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN			
		X.XX. 01.1. 07.00 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****							0		0		1.500.000.000			2.000.000 .000		2.200.000.000	INSPEKTOR AT			
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan ****		Unit	2	N/A	N/A	0	N/A	0	3	1.500.000.000	4	2.000.000 .000	4	2.200.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 07.00 05		Pengadaan Mebel ****							50.000.000		50.000.000		250.000.000		200.000.000		220.000 .000	INSPEKTOR AT				
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan ****	Paket	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1	220.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		X.XX. 01.1. 07.00 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****							100.000 .000		100.0 00.00 0		500.000 .000		500.000.0 00		550.000 .000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan ****	Unit	2	1	1	100.000 .000	1	100.0 00.00 0	1	500.000 .000	1	500.000.0 00	1	550.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			
		X.XX. 01.1. 07.00 07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****							100.000 .000		100.0 00.00 0		250.000 .000		250.000.0 00		270.000 .000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan ****	Unit	N/A	N/A	1	100.000 .000	1	100.0 00.00 0	1	250.000 .000	1	250.000.0 00	1	270.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			
		X.XX. 01.1. 07.00 08		Pengadaan Aset Tak Berwujud ****							0		0		100.000 .000		200.000.0 00		270.000 .000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan ****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	1	100.000 .000	1	200.000.0 00	1	270.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi			
		X.XX. 01.1. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***							2.220.0 00.000		2.270 .000. 000		2.270.0 00.000		2.620.000 .000		2.926.0 00.000	INSPEKTOR AT				
					Tersedianya jasa penunjang urusan	Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	N/A	4	4	2.220.0 00.000	4	2.270	4	2.270.0 00.000	4	2.620.000 .000	4	2.926.0 00.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah ****	penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****							.000.000							DAN KEUANGAN			
		X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****								50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		INSPEKTOR AT		
						Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****							550.000.000		600.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000	INSPEKTOR AT		
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ****	Laporan	1	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08.0003				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	INSPEKTOR AT		
						Tersedianya Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	OPD Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											2026		2027		2028		2029		2030							
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
						Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan ****														DAN KEUANGAN					
		X.XX.01.1.08.0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****								1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000		2.050.000.000	INSPEKTOR AT			
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan ****	Laporan	1	1	1	1.600.000.000		1	1.600.000.000		1	1.600.000.000		1	1.850.000.000		2.050.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.556.823.000		1.705.299.000		2.100.000.000		2.650.000.000		2.843.207.000	INSPEKTOR AT			
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	136	136	136	1.556.823.000		136	1.705.299.000		136	2.100.000.000		136	2.650.000.000		136	2.843.207.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas								600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		800.000.000	INSPEKTOR AT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Operasional atau Lapangan ****																			
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya ****	Unit	23	23	23	600.000 .000	23	650.0 00.00 0	23	700.000 .000	23	700.000.0 00	23	800.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 09.00 05			Pemeliharaan Mebel ****							50.000. 000		50.00 0.000		100.000 .000		200.000.0 00		233.207 .000	INSPEKTOR AT			
						Terlaksana ny Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara ****	Unit	7	7	7	50.000. 000	7	50.00 0.000	7	100.000 .000	7	200.000.0 00	7	233.207 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 09.00 06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****							175.000 .000		175.0 00.00 0		200.000 .000		300.000.0 00		325.000 .000	INSPEKTOR AT			
						Terlaksana ny Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara ****	Unit	50	50	50	175.000 .000	50	175.0 00.00 0	50	200.000 .000	50	300.000.0 00	50	325.000 .000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ****							75.000. 000		75.00 0.000		100.000 .000		100.000.0 00		110.000 .000	INSPEKTOR AT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Real isasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Terlaksana ny a Pemeliharaa n Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara ****	Unit	N/A	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	110.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 09.00 08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****						0		0		0		0		100.000.000	125.000.000	INSPEKTOR AT			
						Terlaksana ny a Pemeliharaa n Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara ****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	100.000.000	2	125.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 09.00 09			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****						500.000.000		550.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	INSPEKTOR AT				
						Terlaksana ny a Pemeliharaa n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ****	Unit	1	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
		X.XX. 01.1. 09.00 11			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****						156.823.000		205.299.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	INSPEKTOR AT				
						Terlaksana ny a Pemeliharaa n/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	N/A	1	1	156.823.000	1	205.299.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	OPD Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2026		2027		2028		2029		2030					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****													DAN KEUANGAN				

Adapun uraian sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung program prioritas daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
I	<b>Program Intervensi</b>			
	1. Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Evaluasi Zona Integritas pada OPD dan BLUD	Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM  Target 2026 : 8 Perangkat Daerah  Target 2027 : 8 Perangkat Daerah  Target 2028 : 8 Perangkat Daerah  Target 2029 : 8 Perangkat Daerah  Target 2030 : 8 Perangkat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi melalui Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
	2. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa	Analisis peta jabatan dan usulan formasi jabatan:  1. Usulan formasi jabatan yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah	Usulan Formasi Jabatan :  Target 2026 : 1 dokumen  Target 2027 : 1 dokumen  Target 2028 : 1 dokumen  Target 2029 : 1 dokumen  Target 2030 : 1 dokumen  Usulan Peta Jabatan :	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
		2. Revisi peta jabatan yang disampaikan ke Biro Organisasi	Target 2026 : 1 dokumen Target 2027 : 1 dokumen Target 2028 : 1 dokumen Target 2029 : 1 dokumen Target 2030 : 1 dokumen Target 2030 : 1 dokumen	
		Pengembangan SIMWAS dengan SIMWAS Dumas dan e-audit	Pengintegrasian SIMWAS TL dengan SIMWAS Dumas dan e-audit Target 2026 : 1 Unit Target 2030 : 1 Unit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
III	Program Aksi			
	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	1. Pembuatan MOOC Anti Korupsi bekerjasama dengan BPSDMD	Target 2026 : 1 Dokumen	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
		2. Sosialisasi Anti Korupsi untuk ASN;	Target 2026 : 8 OPD	

<b>No</b>	<b>Program Daerah</b>	<b>Rencana Aktivitas Riil</b>	<b>Output/Target/Volume</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
			Target 2027 : 8 OPD Target 2028 : 8 OPD Target 2029 : 8 OPD Target 2030 : 8 OPD	
		3. Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar SMA, SMK.	Target 2026 : 24 SMA/SMK Target 2027 : 24 SMA/SMK Target 2028 : 24 SMA/SMK Target 2029 : 24 SMA/SMK Target 2030 : 24 SMA/SMK	

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 4.2.1 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tabel 4.2.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2.1**

### **Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Baseline Tahun</b>		<b>Target Capaian Tahun</b>							<b>Ket</b>
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>		
1.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3	3,47	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60		
2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTORAT	81,03	82,09	82,79	83,49	84,1	84,89	85,59	85,59		
3.	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3,06	3,02	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0		
4.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	3,096	3,146	3,196	3,246	3,296	3,346	3,396		

Pada tabel 4.2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 – 2029 mempunyai empat indikator kinerja utama yang akan mendukung sasaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2.2**  
**Indikator Kinerja Kunci**

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun							Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4		

Pada tabel 4.2.2 menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Tingkat Maturitas SPIP dan Kualitas APIP dinilai dengan satuan level berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan BPKP.

Selain IKU dan IKK, juga ditetapkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu Pendidikan; Kesehatan; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bukan termasuk perangkat daerah yang terkait 6 (enam) urusan wajib dasar tersebut sehingga pada tabel dibawah dijelaskan dengan keterangan nihil.

**Tabel 4.2.3**  
**Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

No	Indikator Kinerja SPM	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun							Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		N	I	H	I	L					

## **BAB V** **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan mulai dari Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan melakukan upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui rumusan Rencana Strategis ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah mempersiapkan diri untuk berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Bila nantinya alokasi anggaran tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam Renstra ini, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mengajukan perubahan anggaran melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku, guna memastikan kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal dan tetap sejalan dengan arah kebijakan strategis daerah.

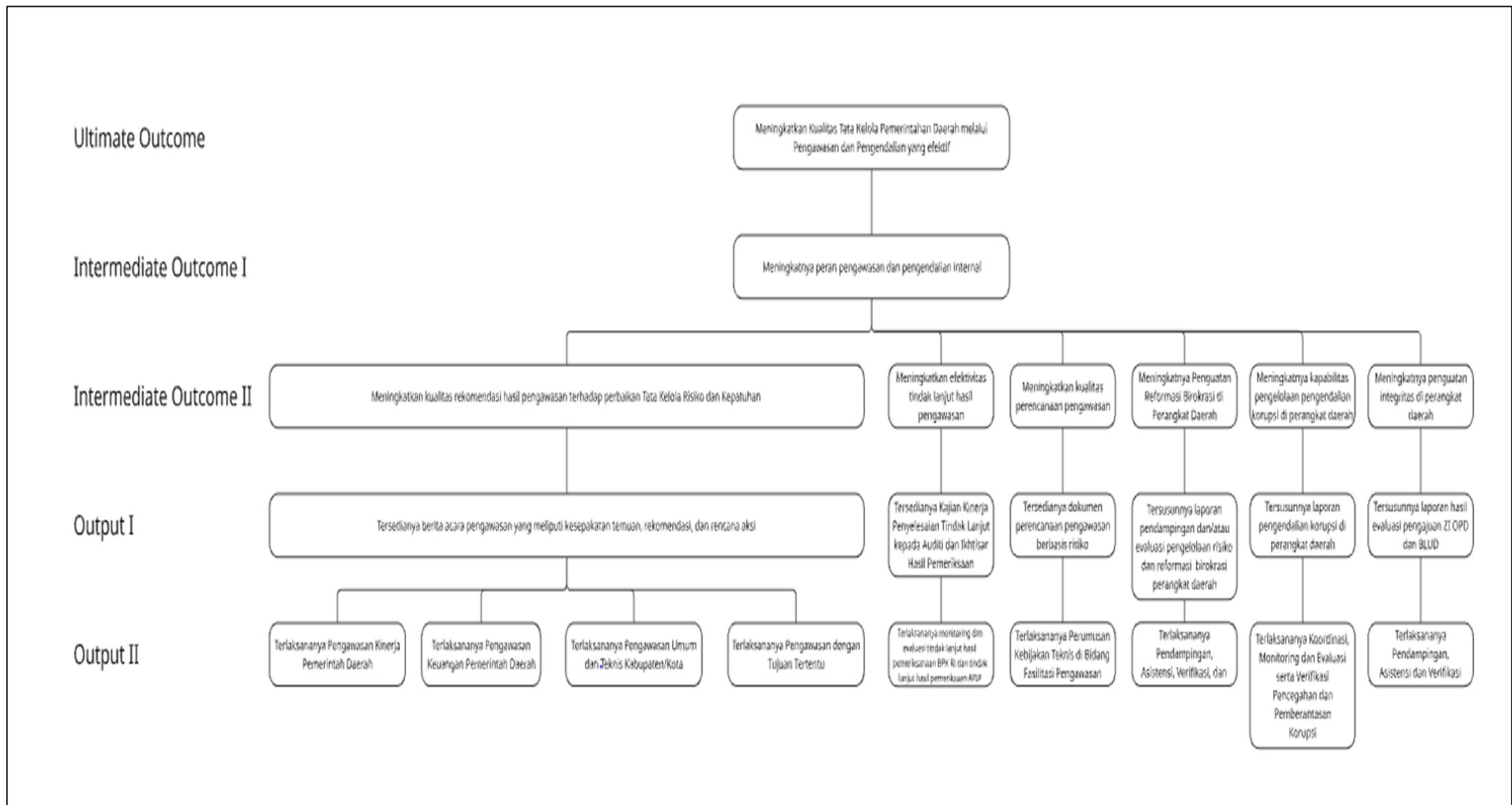
Terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi pengawasan intern yang efektif dan berkualitas dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
2. Akselerasi transformasi digital pengawasan seiring berkembangnya teknologi informasi.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan cara meningkatkan kompetensi SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi jabatan fungsional auditor, serta penataan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong profesionalisme dan kualitas hasil pengawasan.
4. Sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder pengawasan dengan cara meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan BPK, BPKP, KPK, Ombudsman, serta masyarakat melalui forum-forum koordinasi pengawasan dan libelatian publik.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar integritas dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pengawasan.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.

## **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1. POHON KINERJA



## LAMPIRAN 2. CASCADING

Tujuan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif								
Indikator Kinerja	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi								
Sasaran	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal								
Indikator Kinerja	Level Kapabilitas APIP						Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		
Program	Program Penyelenggaraan Pengawasan						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		
Indikator Kinerja	Percentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Percentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Percentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Percentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	Percentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	Percentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	Percentase OPD yang mendapatkan IEPK level 3	Percentase OPD yang memperoleh predikat Zona Integritas
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi	
Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terbit	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang terbit	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi bidang Pengawasan Khusus yang terbit	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD
Sub Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Unit Kerja	Subbag Analisis dan Evaluasi	Inspektor Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektor Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Inspektor Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Inspektor Pembantu Bidang Pengawasan Khusus	Subbag Perencanaan	Subbag Perencanaan dan Subbag Analisis&Evaluasi	Subbag Administrasi Umum&Keuangan dan Subbag Analisis&Evaluasi	Subbag Analisis dan Evaluasi

Tujuan	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis								
Indikator Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
Sasaran	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							
Indikator Kinerja	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah							
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
Indikator Kinerja	Percentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Percentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah							
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Indikator Kinerja	Percentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		Percentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan				
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Unit Kerja	Subbag Perencanaan	Subbag Analisis dan Evaluasi	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

Tujuan	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis							
Indikator Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							
Indikator Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah							
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
Indikator Kinerja	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah							
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Indikator Kinerja	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan							
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Indikator Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Unit Kerja	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

Tujuan	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis														
Indikator Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah														
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah														
Indikator Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah														
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Indikator Kinerja	Pembatasan tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah														
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Indikator Kinerja	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan						
Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dilayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Unit Kerja	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

### LAMPIRAN 3.Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renstra PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renstra PD. Kertas kerja manajemen risiko harus dilampirkan dalam dokumen Renstra PD, terutama risiko strategis perangkat daerah. Proses manajemen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### a. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													
Sasaran Strategis		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)											

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah										
Sasaran Strategis				Indeks Kepuasan Masyarakat									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Sasaran Program						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawai an, dan keuangan perangkat daerah			Pegawai memberikan pelayanan yang tidak sesuai SOP	Risiko Fraud	keterlambatan dalam melakuk an administrasi	Adanya keluhan oleh pegawai dan pengguna layanan	Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan penggun

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													a layanan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Selisih perhitungan gaji pegawai	Risiko Operasional	Ketidak elitian administ rasi	Kurang bayar gaji pegawai	Pegawai Inspektorat Prov. Jateng
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan								Jumlah jenis dokumen administrasi barang	Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	Risiko Operasional	Kurang tertibnya administ rasi	Tidak semua barang milik	Inspektorat Prov. Jateng

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								milik daerah pada perangkat daerah				daerah dapat terpenuhi asuransi	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Sasaran Kegiatan								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Potensi tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	Risiko Operasional	Penetuan Jadwal dan Peserta yang berbenturan dengan jadwal penugasan	Tidak terpenuhinya target peserta	Pegawai Inspektorat Prov. Jateng
								Administrasi Umum Perangkat Daerah					

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Meningkatnya jumlah kunjungan studi banding dari pihak luar	Risiko Operasional	Meningkatnya apresiasi pihak luar terhadap kinerja Inspektorat	Anggaran makan minum yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan	Inspektorat Prov. Jateng, pelaku kunjungan
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Sasaran Kegiatan								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pendistribusian barang tidak dilakukan sesuai kebutuhan	Risiko Operasional	Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat	Pembagian barang operasional tidak merata	Inspektorat Prov. Jateng

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah						
Sasaran Kegiatan								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun	Surat hilang dan tidak terlacak	Risiko Operasional	Surat tidak didokum entasiakan dalam sistem	Informasi dalam surat tidak tersampikan pada pihak yang dituju	Internal dan eksternal Inspektorat Prov. Jateng
							Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah						

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pembiayaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas terlambat	Risiko Operasional	Kurang tertibnya administrasi	Kendaraan tidak bisa digunakan untuk melaksanakan tugas	Inspektorat Prov. Jateng
			<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah</b>										
Sasaran Strategis				Indeks Manajemen Risiko									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					DAERAH PROVINSI								
Sasaran Program						Persentase tingkat ketercapai an kinerja perangkat daerah			Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	Risiko Operasional	Kurang validnya data dukung kinerja	Tidak terukurnya capaian kinerja	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Sasaran Kegiatan								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Risiko Operasional	Keterbatasan sumber daya	Tidak dapat dijalankan kegiatan dan evaluasi dengan baik	Inspektorat Prov. Jateng

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								perundangan					
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi													
Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi							Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Risiko Fraud	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pemda	

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah										
Sasaran Strategis				Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah					Penyelenggaraan MR masih sekedar pemenuhan dokumen	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen pemilik risiko dalam menerapkan MR	Entitas tidak dapat memitigasi risiko yang dimiliki	OPD
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Program						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3		Tindakan pencegahan tidak terstruktur	Risiko Kepatuhan	Perangkat daerah belum memiliki aturan/pedoman teknis pengendalian korupsi	Skor IEPK tidak mencapai level 3	Pemda	
							Pendampingan dan Asistensi						
Sasaran Kegiatan								Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Wajib Lapor LHKAN tidak melaporkan LHKAN	Risiko Kepatuhan	Kurangnya komitmen dari Wajib Lapor	Capaian pelaporan LHKAN tidak sesuai dengan target 100%	Pemda

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Program						Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3		Penilaian MRI dilakukan secara formalitas tanpa implementasi nyata.	Risiko Kepatuhan	belum terdapat metodologi dan pelaksaan monitoring evaluasi atas tindak pengendalian risiko yang telah direncanakan	Nilai MRI tidak mencerminkan kondisi sebenarnya	Pemda	
Sasaran Kegiatan						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Program Kerja Pengawasan Tahunan belum berbasis risiko	Risiko Operasional	Kurang data dukung terkait peta risiko	Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	Inspektorat Prov. Jateng
							Pendampingan dan Asistensi						
Sasaran Kegiatan								Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	Evaluasi Reformasi Birokrasi belum berjalan	Risiko Operasional	Belum adanya petunjuk teknis terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi	OPD tidak mendapat hasil penilaian Reformasi Birokrasi	Pemda
			<b>Meningkatnya Peran Pengawas</b>										

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>an Internal</b>											
Sasaran Strategis				Level Kapabilitas APIP					Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan	Risiko Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Kinerja belum bisa menyimpulkan 3E (efektif, efisien dan ekonomis)</li> <li>Belum semua pemeriksa memahami audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E</li> </ul>	Organisasi tidak mampu memenuhi tujuannya dan mencapai hasil yang diinginkan	Pemda
					PROGRAM PENYELENGGARAAN								

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PENGAWASAN								
Sasaran Program						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri			terdapat salah tafsir tindak lanjut terkait rekomendasi yang diberikan kepada obrik	Risiko Operasional	monitoring tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh Subbagian lain dan bukan pemeriksa	hasil rekomendasi tidak dapat memberikan efek perbaikan seperti apa yang diharapkan	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
Sasaran Kegiatan								Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	Keterlambatan pembuatan dokumen IHPS	Risiko Operasional	Data dukung yang kurang memadai	Terlambatnya informasi hasil pemeriksaan	Inspektorat Prov. Jateng dan OPD

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		
												Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah		Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyelesaian kebijakan dan berhubungan dengan pihak ketiga	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda		
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Risiko Operasional	Penyerahan LKPD dari Penyusunan LKPD kepada Inspektorat	Keterlambatan penyerahan Reviu LKPD kepada Inspektorat	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah	

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Keuangan Daerah	(LKPD) tidak tepat waktu		Provinsi Jawa Tengah terlambat.	dan LKPD Provinsi Jawa Tengah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga performa Inspektora t dinilai tidak profesional	Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Program								Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												ngan dengan pihak ke 3	
							Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	Risiko Operasional	Ketidakpatuhan Obyek Pemeriksaan dalam diperiksa dan kesulitan dalam data dukung	Proses pemeriksaan tidak dapat sesuai target waktu	Inspektorat Prov. Jateng
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksa	Obyek Pemeriksaan dan Pemda

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						pengawasan kinerja perangkat daerah			tidak selesai tepat waktu		waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	an terlambat	
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Kurangnya data atau informasi dari Obyek Pemeriksaan	Obyek Pemeriksaan belum dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan OPD

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		
												Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyelesaian kebijakan dan berhubungan dengan pihak ketiga	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda		
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	Risiko Operasional	- Surat permintaan untuk reviu dari Biro Pemotdaker (LPPD)	Evaluasi LPPD tidak sesuai jadwal	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah	

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pemerintah Daerah			terlambat di kirim ke Inspektorat Prov. Jateng - Data yang di berikan belum memadai		Provinsi Jawa Tengah

### b. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Sasaran Program</b>									
1	Pegawai memberikan	2	5	10	Ada	Rapat Koordinasi Pengendalian	Memadai	1	3	3

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pelayanan yang tidak sesuai SOP					Operasional Kegiatan				
2	Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	2	5	10	Ada	Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan	Memadai	1	3	3
3	Tindakan pencegahan tidak terstruktur	3	5	15	Ada	Menyusun Petunjuk Teknis Pencegahan Korupsi dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memadai	2	5	10
4	Penilaian MRI dilakukan secara formalitas tanpa implementasi nyata.	3	5	15	Ada	Sosialisasi Manajemen Risiko dan dilakukan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memadai	2	5	10

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	terdapat salah tafsir tindak lanjut terkait rekomendasi yang diberikan kepada obrik	3	5	15	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	5	10
6	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8
7	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8
8	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8
9	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Sasaran Kegiatan</b>									
1	Selisih perhitungan gaji pegawai	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi Operasional Kegiatan	Memadai	1	5	5
2	Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	1	5	5	Ada	Pencatatan dan perhitungan anggaran asuransi barang milik daerah	Memadai	1	3	3
3	Potensi tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	3	5	15	Ada	Sudah ada penyusunan jadwal diklat	Memadai	2	5	10
4	Meningkatnya jumlah kunjungan studi banding dari pihak luar	3	4	12	Ada	Mengusulkan tambahan anggaran	Memadai	3	3	9

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pendistribusian barang tidak dilakukan sesuai kebutuhan	3	5	15	Ada	Pencermatan kebutuhan dan verifikas RAB Inspektorat Prov. Jateng	Memadai	2	5	10
6	Surat hilang dan tidak terlacak	2	5	10	Ada	Mengimbau kepada pelaksana agar menginput surat dalam aplikasi tatapraja	Memadai	1	4	4
7	Pembiayaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas terlambat	1	5	5	Ada	Penertiban arsip terkait pajak kendaraaan	Memadai	1	3	3
8	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	2	5	10	Ada	Rapat Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi	Memadai	1	4	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Wajib Lapor LHKAN tidak melaporkan LHKAN	2	5	10	Ada	Pendampingan dan monitoring Inspektorat kepada Wajib Lapor	Memadai	1	4	4
10	Program Kerja Pengawasan Tahunan belum berbasis risiko	3	5	15	Ada	Rapat Pembahasan dan Koordinasi dengan BPKP	Memadai	2	5	10
11	Evaluasi Reformasi Birokrasi belum berjalan	3	5	15	Ada	Rapat Koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov. Jateng	Belum memadai	2	5	10
12	Keterlambatan pembuatan dokumen IHPS	2	5	10	Ada	Rapat Internal Subbag	Memadai	1	5	5
13	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak tepat waktu	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi dengan BPKAD Prov. Jateng	Memadai	1	3	3

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	2	5	10	Ada	Melakukan wawancara dengan pengadu dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur	Memadai	1	5	5
15	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	2	5	10	Ada	Pengarahan sebelum penugasan dan peer review setelah pemeriksaan	Memadai	1	4	4
16	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi dengan Biro Pemotdaker Setda Prov. Jateng	Memadai	1	3	3

**c. Penetapan Risiko Prioritas**

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
	<b>Sasaran Program</b>				
1	Tindakan pencegahan tidak terstruktur	10	Sekretaris	Perangkat daerah belum memiliki aturan/pedoman teknis pengendalian korupsi	Skor IEPK tidak mencapai level 3
2	Penilaian MRI dilakukan secara formalitas tanpa implementasi nyata.	10	Sekretaris	belum terdapat metodologi dan pelaksanaan monitoring evaluasi atas tindak pengendalian risiko yang telah direncanakan	Nilai MRI tidak mencerminkan kondisi sebenarnya
3	terdapat salah tafsir tindak lanjut terkait rekomendasi yang diberikan kepada obrik	10	Sekretaris	monitoring tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh Subbagian lain dan bukan pemeriksa	hasil rekomendasi tidak dapat memberikan efek perbaikan seperti apa yang diharapkan
	<b>Sasaran Kegiatan</b>				
1	Potensi tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	10	Kasubbag AdumKeu	Penentuan Jadwal dan Peserta yang berbenturan dengan jadwal penugasan	Tidak terpenuhinya target peserta
2	Pendistribusian barang tidak dilakukan sesuai kebutuhan	10	Kasubbag AdumKeu	Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat	Pembagian barang operasional tidak merata
3	Program Kerja Pengawasan Tahunan belum berbasis risiko	10	Irban AKD	Kurang data dukung terkait peta risiko	Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran
4	Evaluasi Reformasi Birokrasi belum berjalan	10	Irban PPD	Belum adanya petunjuk teknis terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi	OPD tidak mendapat hasil penilaian Reformasi Birokrasi

**d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian**

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Implementasi RB parsial dan tidak terintegrasi	15	RB dianggap hanya urusan sekretariat/inspektorat, bukan tanggung jawab semua	Indeks Reformasi Birokrasi tidak mencerminkan kondisi riil	Menyusun rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Sasaran								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ulasan negatif pelanggan di situs ulasan publik	10	Perilaku pegawai yang tidak sesuai NSPK ASN	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Penerapan Whistleblowing System (WBS) internal untuk melaporkan pelanggaran perilaku	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Indeks Manajemen Risiko	Adanya risiko strategis	10	Kurangnya komitmen UPR dalam	Berpotensi terjadi permasalahan	Melakukan FGD dan brainstorming	Inspektur Provinsi	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Risiko Perangkat Daerah		yang tidak teridentifikasi		mengidentifikasi risiko	n yang tidak ada tindak pengendaliannya	g saat penyusunan Risk Register	Jawa Tengah	
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai indeks SPIP menurun	15	Tim pemeriksaan kurang adaptif atas perubahan regulasi atau standar penilaian SPIP dari BPKP	Perangkat daerah gagal menyesuaikan	Menyusun Juknis pelaksanaan PM SPIP tingkat Perangkat Daerah sebagai panduan Perangkat Daerah	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Sasaran								
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Perolehan nilai MRI tiap Perangkat Daerah dibawah 3	10	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Melakukan penyempurnaan rencana aksi pelaksanaan	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Daerah Provinsi Jawa Tengah		pengelolaan risiko		
Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Pengawalan program prioritas Gubernur dalam peningkatan pembangunan tidak dapat dijalankan secara maksimal	10	sistem kelembagaan yang kurang mendukung, anggaran yang belum mencukupi, SDM yang masih perlu ditingkatkan, sarana penunjang yang kurang mendukung	peningkatan pembangunan yang belum dapat meningkat	Menyusun PKPT tahun n+1 dengan menyesuaikan dengan program prioritas Gubernur	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030